



**RILIS KUNJUNGAN KERJA KOMISI II DPR RI
PADA RESES MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2023 – 2024
KE KABUPATEN MAROS PROVINSI SULAWESI SELATAN
TANGGAL 6 – 10 MEI 2024**

Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan legislatif sebagaimana tercantum dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Komisi II DPR RI telah melakukan kunjungan kerja reses ke Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan pada periode persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024, Tanggal 6 Mei 2024. Tujuan dari kunjungan kerja reses Komisi II DPR RI ke Provinsi Jawa Timur adalah untuk memperoleh informasi, penjelasan, dan keterangan terkait beberapa hal, antara lain evaluasi pemilu serentak Tahun 2024, utamanya terkait dengan tahapan kampanye, Validasi Daftar Pemilih Tetap, pengamanan dan pendistribusian logistik hingga ke TPS, serta pengawasan tahapan pemilu. Selain itu, komisi II DPR RI juga ingin mengevaluasi dan memahami secara lengkap pelaksanaan program-program prioritas pertanahan dan penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan pertanahan.

Kegiatan Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI dipimpin oleh Anggota DPR RI, Bapak H. Haruna, MA, MBA dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Kegiatan ini berlangsung di Kantor Bupati Kabupaten Maros dan dihadiri oleh Bupati Maros, Bapak Dr. H.A.S. Chaidir Syam, S.IP., MH beserta stafnya. Turut hadir juga perwakilan dari KPU Kabupaten Maros, Bawaslu Kabupaten Maros, dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maros. Selain itu, dalam rapat tersebut, juga hadir pejabat dari Kementerian/Lembaga yang bermitra dengan Komisi II DPR RI. Dari Kementerian ATR/BPN, hadir Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Yulia Jaya Nirmawati.

Dalam sambutan yang disampaikan oleh Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI mengapresiasi pelaksanaan pemilu serentak yang dilaksanakan pada 14 Februari 2024 yang lalu telah berjalan aman, tertib, dan damai di seluruh wilayah Indonesia. Kelancaran dan kesuksesan pemilu serentak tidak lepas dari kerja keras, sinergi, dan kolaborasi dari semua pihak yang terlibat mulai dari penyelenggara pemilu, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, peserta pemilu, aparat keamanan, dan masyarakat. Hal ini dapat terbukti dari tingginya tingkat partisipasi masyarakat

Indonesia dalam pemilu serentak tahun 2024 yang mencapai 81.78%. Bahkan partisipasi masyarakat Kabupaten Maros dalam pemilu serentak tahun 2024 mencapai 85.84% melebihi capaian secara nasional.

Akan tetapi, pada pelaksanaannya terjadi berbagai permasalahan pada hampir setiap tahapan dalam pemilu, seperti Alat Peraga Kampanye (APK) yang dipasang tidak sesuai aturan, pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), integritas penyelenggara pemilu, politik uang, penyebaran hoax, keterlambatan distribusi logistik pemilu, perbedaan data pada aplikasi Sistem Informasi dan Rekapitulasi (Sirekap). Selain itu, diketahui Provinsi Sulawesi Selatan merupakan provinsi yang banyak menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU). Terdapat 64 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Provinsi Sulawesi Selatan melakukan PSU.

Selain melakukan evaluasi pelaksanaan tahapan pemilu serentak tahun 2024, kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke Kabupaten Maros juga melakukan evaluasi pelaksanaan reforma agraria. Berdasarkan laporan tahunan Ombudsman RI 2023, BPN menduduki peringkat ke-2 instansi terlapor yang paling banyak dilaporkan masyarakat dalam masalah pelayanan publik. Selain itu, substansi laporan tentang masalah pertanahan dan tata ruang menjadi menduduki peringkat ke-1. Komisi II DPR RI juga telah banyak menerima pengaduan masyarakat terkait dengan berbagai masalah pertanahan, baik yang disampaikan secara langsung ke Komisi II DPR RI, maupun pada saat melaksanakan kegiatan di daerah pemilihan masing-masing.

Berbagai pengaduan tersebut tidak hanya terkait dengan konflik ataupun sengketa tanah yang terjadi, tapi juga berkaitan dengan kinerja BPN yang merupakan garda terdepan dalam menangani berbagai persoalan pertanahan yang terjadi di Indonesia. Sebagai institusi yang memiliki tugas, fungsi dan tanggung jawab terhadap urusan keagrariaan atau pertanahan di Indonesia, Kementerian ATR/BPN dituntut untuk dapat melaksanakan tugasnya dalam melindungi hak-hak masyarakat atas tanah, namun di sisi lain harus tetap bekerja sesuai dengan koridor sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Terlebih lagi, Kementerian ATR/BPN juga memiliki tugas penting terkait pelaksanaan program-program pertanahan yang menjadi prioritas, seperti antara lain: digitalisasi data pertanahan, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), reforma agraria (asset reform dan access reform), pemanfaatan pengendalian tanah dan ruang, percepatan rencana tata ruang, hingga penanganan kasus-kasus pertanahan. Pada kesempatan yang sama, H. Haruna menyampaikan agar program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Maros ingin jumlah target PTSL-nya ditambah. Lalu juga ada percepatan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Dalam penutup rapat, Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI menyampaikan bahwa Komisi II DPR RI akan berupaya mendukung sekaligus mengawasi kinerja dari Pemerintah Kabupaten Maros beserta jajarannya agar senantiasa dapat secara optimal melaksanakan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan berbagai kegiatan maupun dalam menangani berbagai permasalahan yang ada.

Kabupaten Maros, 6 Mei 2024,
Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI ke Kabupaten Maros Provinsi
Sulawesi Selatan.